



Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan

Simela Victor Muhamad^{*)}

Abstrak

Laut China Selatan yang sebagian atau seluruh wilayahnya diklaim sebagai wilayah kedaulatan sejumlah negara kawasan kembali menjadi perhatian masyarakat internasional, terutama setelah timbul ketegangan antara China dan Filipina di perairan kawasan itu dalam minggu kedua dan ketiga bulan April 2012. Sering munculnya ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China menarik untuk dikaji, di antaranya: Apa kepentingan China di kawasan itu? Bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional yang paling berpengaruh di kawasan dan beberapa anggotanya terlibat dalam persoalan klaim teritorial di Laut China Selatan menyikapi persoalan ini?

Pendahuluan

Isu sengketa Laut China Selatan kembali menjadi pemberitaan media massa pada waktu belakangan ini, terutama setelah China dan Filipina bersitegang di kawasan tersebut menyusul pengiriman kapal-kapal patroli China untuk mencegah kapal perang Filipina menangkap nelayan China dekat Scarborough Shoul pada 8 April 2012, yang diklaim kedua pihak sebagai wilayah kedaulatan masing-masing. Kedua negara pun saling melempar tuduhan telah melakukan pelanggaran di wilayah yang dipersengketakan di Laut China Selatan.

Ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China bukanlah yang pertama atau satu-satunya. Konfrontasi-konfrontasi yang mirip sering terjadi antara China dan negara-negara tetangganya. Sebenarnya hal ini tidak begitu mengagetkan mengingat

China pernah mendeklarasikan bahwa Laut China Selatan merupakan salah satu "core interest" negaranya. Artinya, salah satu prioritas Beijing adalah menguasai wilayah Laut China Selatan dan tidak segan untuk mengabaikan kepentingan negara tetangganya dan hukum laut internasional.

Dalam sejarahnya, wilayah Laut China Selatan memiliki peran dan arti geopolitik yang sangat besar karena menjadi titik temu antara negara China dan tetangga-tetangganya terutama yang berada dalam wilayah ASEAN dalam hal sejarah, masalah teritorial, keamanan dan juga hal-hal seperti sumber daya alam dan *energy security*. Pertanyaan yang cukup konvensional adalah, apa kepentingan China di Laut China Selatan? Dan bagaimana posisi ASEAN, sebagai organisasi regional yang paling berpengaruh di kawasan, menyikapi isu sengketa Laut China Selatan ini?

^{*)} Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: victorsimela@yahoo.co.id

Cadangan Migas

Wilayah Laut China Selatan terdiri dari antara lain, beberapa pulau kecil yang tersebar luas. Dua kelompok pulau yang banyak diperebutkan adalah kepulauan Spratly dan Paracel. Tetapi apabila kita lihat, sebenarnya nilai ekonomis dua kepulauan tersebut, dalam konteks sumber daya alam yang ada di daratannya, tidak begitu signifikan. Fitur-fitur fisik utama dari pulau-pulau tersebut adalah batuan, terumbu karang, pasir dan beberapa lainnya yang berada di bawah laut dan tanahnya tidak sesuai untuk bercocok tanam dan dalam sejarahnya pulau-pulau tersebut juga tidak mampu menyokong kehidupan dan aktivitas manusia.

Namun, pada tahun 1968 ditemukan cadangan minyak bumi yang menaikkan nilai Laut China Selatan secara dramatis. Cadangan minyak potensial di kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan sampai 105 milyar barrel dan di seluruh Laut China Selatan sebanyak 213 milyar barrel. Meskipun bukti keberadaan cadangan minyak tersebut belum begitu kuat, perkiraan potensial cadangan minyak tersebut bisa dipastikan menjadi salah satu faktor ketertarikan China dan juga negara-negara di kawasan terhadap wilayah ini.

Sumber daya hidrokarbon juga menjadi daya tarik tersendiri. Menurut estimasi Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) 60-70% hidrokarbon di kawasan merupakan gas alam. Sementara itu, penggunaan sumber daya gas alam diproyeksikan bertambah sebanyak 5% per tahun untuk dua dekade yang akan datang. Jumlahnya diperkirakan sebanyak 20 *trillion cubic feet* (Tcf) per tahun, lebih cepat daripada bahan bakar lainnya.

Jalur Pelayaran Penting

Laut China Selatan juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting. Jalur ini seringkali disebut *maritime superhighway* karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Lebih dari setengah lalu lintas supertanker dunia berlayar melalui jalur ini

lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang berlayar melewati Selat Malaka dan bagian barat daya Laut China Selatan bahkan lebih dari tiga kali yang melewati Terusan Suez dan lebih dari lima kali lipatnya Terusan Panama.

Selama dua puluh tahun ke depan konsumsi minyak bumi di negara-negara Asia akan naik 4% rata-rata per tahun. Apabila laju pertumbuhan tetap konsisten, permintaan minyak bumi akan naik menjadi 25 juta barrel per hari. Mau tidak mau untuk mengatasi permintaan Asia dan Jepang harus dilakukan impor minyak dari Timur Tengah. Kapal-kapal tanker pengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia tersebut setelah melewati Selat Malaka harus melalui Laut China Selatan.

Pelayaran komersial di Laut China Selatan didominasi oleh bahan mentah yang menuju negara-negara Asia Timur, dan yang melewati Selat Malaka dan Kepulauan Spratly sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair (LNG), sementara kargo kering kebanyakan batubara dan bijih besi. Pengangkutan LNG melewati Laut China Selatan mewakili dua per tiga dari perdagangan LNG seluruh dunia menuju Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.

Kepentingan Militer

Secara geostrategis, kawasan Laut China Selatan juga memiliki arti penting bagi strategi militer, khususnya untuk manuver kapal selam nuklir dan *deterrence*. Ini bisa diartikan bahwa kehadiran China di kawasan ini tidak ingin sekedar menciptakan ZEE yang luas tetapi juga ingin mengendalikan lautan untuk mencapai proyeksi kekuatan yang lebih jauh, baik itu di sekitar Samudera Pasifik maupun Samudera Hindia. Saat ini misi utama dari militer China atau *People's Liberation Army* (PLA) adalah: 1) mengamankan kapal masuk Taiwan; 2) menjalankan operasi di Pasifik Barat untuk menghalangi musuh; 3) melindungi jalur komunikasi laut China; dan 4) memutus jalur komunikasi musuh.

Kemampuan *deterrence* nuklir berbasis laut merupakan prioritas dalam strategi militer China. China diperkirakan akan memperoleh kemampuan *second-strike* dengan memperkenalkan rudal SLBM JL-2 yang memiliki jangkauan 8.000 km. Kemampuan penghalang China, terutama kapal selam tenaga nuklir yang cenderung tidak bersuara, dapat digunakan untuk menangkal operasi kapal selam musuh. Kapal induk China juga dapat digunakan untuk membungkam tetangga-tetangganya yang juga memiliki klaim teritorial. Pulau-pulau kecil di Laut China Selatan dapat digunakan sebagai pangkalan intelijen, pengawasan dan pengintaian.

Terlihat di sini, berdasarkan uraian di atas, wilayah Laut China Selatan memiliki arti penting bagi China, mulai dari kepentingan ekonomi sampai kemampuan proyeksi kekuatan militer dan penggentar nuklir. Namun, usaha-usaha China untuk penetapan wilayah kedaulatan dan perluasan laut teritorialnya tidak disambut dengan baik oleh negara-negara tetangganya yang selain merasa kedaulatannya dilanggar juga memiliki kepentingan di perairan tersebut.

Meskipun secara ekonomi dan militer kuat, China belum berani melakukan pembangunan untuk perluasan dan melakukan aktivitas proyeksi kekuatan secara frontal. China masih harus, paling tidak untuk aktivitas perekonomian, mengandalkan akses jalur laut yang melewati kawasan ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN juga memiliki hubungan diplomatis kuat dengan Amerika Serikat, contohnya perjanjian keamanan Filipina dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, masih sangat penting bagi China mengambil pendekatan diplomatis dan politis dalam menghadapi negara-negara ASEAN.

Posisi ASEAN

Negara-negara ASEAN belum berhasil menyatukan sikap mengenai bagaimana mengelola sengketa di Laut China Selatan yang belakangan ini kembali memanas. Proses pengelolaan sengketa yang

melibatkan China dan empat negara ASEAN (Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei) itu kini memasuki tahapan penting dengan adanya rencana menyusun *Code of Conduct* (CoC) yang nantinya akan disepakati oleh semua negara anggota ASEAN dan China.

Namun, ASEAN belum menemukan titik pandang yang sama mengenai bagaimana perumusan CoC harus dilakukan. Negara-negara ASEAN terbelah dalam mendudukkan posisi dan peran China. Di satu pihak, sebagian negara ASEAN berpendapat bahwa China harus dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan CoC. Sebagian anggota lain, khususnya Filipina dan Vietnam, bersikukuh ASEAN harus menyatukan posisi terlebih dahulu sebelum menyodorkan draf CoC untuk dinegosiasikan dengan China.

Negara-negara ASEAN perlu menyadari bahwa perbedaan yang berlarut-larut di antara mereka akan melemahkan posisi dan memperburuk citra ASEAN. Perbedaan pendapat mengenai bentuk dan waktu keterlibatan China dalam perumusan CoC telah melahirkan spekulasi mengenai besarnya pengaruh China dalam melanggengkan perbedaan pendapat di tubuh ASEAN.

Keputusan Kamboja, sebagai tuan rumah KTT Ke-20 ASEAN, untuk tidak memasukkan soal Laut China Selatan ke dalam agenda resmi KTT dapat dilihat sebagai hasil dari pengaruh dan tekanan China terhadap negara itu. Dengan kata lain, apabila ASEAN tidak dapat menyatukan sikap sesegera mungkin, spekulasi yang mengatakan bahwa China berkemampuan dan berkepentingan untuk menekan ASEAN akan mendapat pembenaran. Ketidakmampuan ASEAN merumuskan posisi bersama mengenai CoC juga akan melahirkan kritik bahwa keinginan ASEAN untuk memiliki suara yang sama sebagai satu komunitas dalam global bangsa-bangsa (*ASEAN Community in a Global Community of Nations*) masih merupakan cita-cita yang jauh dari harapan. Hal ini tentu saja berdampak pada keinginan ASEAN untuk tetap memainkan peran sentral di kawasan Asia Timur, khususnya dalam mengelola hubungan dengan negara-negara besar.

Mengikuti kehendak Kamboja untuk melibatkan China dari awal dalam merancang CoC, yang notabene merupakan keinginan RRC, akan melemahkan kredibilitas dan independensi ASEAN sebagai sebuah komunitas regional. ASEAN tidak perlu tunduk kepada tekanan negara besar mana pun dalam memutuskan apa yang menjadi kepentingannya di kawasan. ASEAN tidak perlu terpengaruh pada posisi Beijing yang keberatan apabila ASEAN menyatukan posisinya terlebih dahulu sebelum memasuki meja perundingan dengan China. Sebab, seperti yang diamanatkan oleh Bali Concord III, ASEAN harus berusaha sekuat mungkin untuk berbicara dengan satu suara.

Namun, harus diakui pula, adalah tidak realistis apabila pandangan dan posisi China diabaikan sama sekali dalam proses ini. Pada akhirnya, berhasil atau tidaknya CoC menjadi sebuah kenyataan akan bergantung pada kesediaan Beijing juga. Oleh karena itu, ASEAN harus mencari bentuk konsultasi yang wajar dengan Beijing dalam proses merancang CoC tanpa harus melepaskan hak ASEAN untuk merumuskan posisi bersama terlebih dahulu. Hal itu antara lain dapat dilakukan melalui jalur-jalur tidak resmi (*second track*) atau jalur-jalur setengah resmi lainnya.

Penutup

Indonesia berkewajiban dan harus mampu memainkan peran positif dan aktif untuk mencari jalan keluar dari kemacetan yang ada sekarang ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan misalnya, Indonesia dapat memulai dengan memprakarsai penyelenggaraan sebuah konferensi setengah resmi mengenai Laut China Selatan yang melibatkan para pejabat dan pakar dari negara-negara ASEAN dan China. Kebuntuan diplomatik kadang kala dapat dipecahkan justru melalui pertemuan-pertemuan tidak resmi atau setengah resmi di antara pihak-pihak yang sedang bertikai.

Rujukan:

1. "RI lauded for S. China Sea maritime proposal", *The Jakarta Post*, 18 Januari 2012.
2. "ASEAN to draft rules of engagement of China", *The Jakarta Post*, 4 April 2012.
3. "S. China issue threatens ASEAN unity", *The Jakarta Post*, 4 April 2012.
4. "Filipina dan China Saling Tuduh Soal Laut China Selatan", *Kompas*, 17 April 2012.
5. "Amankan Nelayan, China Kirim Patroli ke Laut China Selatan", *Republika*, 20 April 2012.
6. "Philippine says new China ship aggravates sea row", *The Jakarta Post*, 20 April 2012.